



**Judul** : Analisis gedung DPR hampir rampung  
**Tanggal** : Kamis, 23 Nopember 2017  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 5

## Analisis Gedung DPR Hampir Rampung

MENTERI PU-Pera Basuki Hadimuljono mengatakan analisis terkait dengan gedung baru DPR akan selesai dalam waktu dekat. Saat ini gedung baru itu masih dianalisis tim PU dan tim pakar.

“Mudah-mudahan satu atau dua hari ini, mudah-mudahan Minggu ini bisa dilaporkan ke saya,” ujar Basuki.

Selain itu, Basuki mengakui tengah menganalisis beberapa hal termasuk mengenai keselamatan, keamanan, dan kenyamanan gedung. Nantinya, hasil analisis tersebut akan disampaikan ke DPR dalam bentuk rekomendasi apakah akan dibangun gedung baru atau tidak.

“Ada tiga hal, yaitu keamanan bangunan, keselamatan bangunan, dan kenyamanan pengguna bangunan. Keamanan itu tentang strukturnya, keselamatan tentang fasilitasnya, kenyamanan tentang utilitasnya. Ruang kerjanya bagaimana, kamar kecilnya bagaimana, satu kamar kecil untuk berapa orang, satu anggota DPR berapa stafnya, luas ruangnya berapa. Nah ini nanti akan kita laporkan hasil evaluasi kami,” imbuhnya.

Pihaknya mengatakan, ada beberapa opsi rekomendasi Kementerian PU-Pera terkait pembangunan gedung baru DPR. Di antaranya apakah perlu pembangunan gedung baru atau cukup dengan renovasi. Namun, jika diperlukan

gedung baru, kata Basuki, gedung lama tetap harus bisa dimanfaatkan.

“Misalnya untuk kenyamanan satu anggota 10 meter persegi, padahal butuhnya 20 meter persegi. Jadi dua ruangan jadi satu. Kan bisa begitu. Baru sisanya bangun baru untuk kenyamanan. Rekomendasinya akan menentukan apakah membangun gedung baru atau tidak. Tapi, yang pasti gedung yang lama harus bisa dimanfaatkan juga. Tidak mungkin *dikosongin*.”

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Irma Suryani Chaniago menyatakan hal utama yang diminta anggota DPR ialah ruangan kerja baru karena gedung lama DPR sudah tak nyaman.

Irma menambahkan penghitungan luas ruangan sepenuhnya ada di tangan Kementerian PU-Pera dan Sekretariat Jenderal DPR. Namun, kalangan anggota DPR menginginkan ruang kerja anggota DPR seluas ruang kerja menteri.

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara, idealnya ruang kerja anggota DPR berukuran 117 meter persegi. Saat ini luasnya hanya sekitar 48 meter persegi. “Desainnya kan yang bikin PU-Pera. Anggaran itu adanya di Satker Sekjen, bukan Satker DPR. Jadi kami tidak ikut campur. Kami minta fasilitasnya saja.” (Nov/P-2)